



PENGIMPLEMENTASIAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

IMPLEMENTATION of ACCRUAL - BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (SAP) On the QUALITY of PRESENTATION of GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS

Rohmadira Aditya¹, Mohamad djasuli², Muhammad Arief Priambadha³, Akhmad Abimanyu⁴, Rafly Ardiansyah⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.

E-mail: rohmadiraa6@gmail.com, djasuli@trunojoyo.ac.id, ariefpriambadha007@gmail.com, akhmad.abimanyu08@gmail.com, raflyardiansyahreal@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Rohmadira Aditya
rohmadiraa6@gmail.com

Key words:

Government Accounting Standards, Accrual Based, Presentation of Financial Reports.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 174 - 194

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) contained in PP Number 71 of 2010. This research also aims to find out whether government accounting standards can influence the quality of presenting government financial reports. This research uses descriptive qualitative methods using various references. The benefits of this research can broaden the readers' insight, especially the general public and SKPD, regarding whether accrual-based Government Accounting Standards (SAP) can influence the quality of presenting government financial reports and whether the implementation of PP 71 of 2010 has been reflected in the presentation of government financial reports. This research provides subjective conclusions regarding the implementation of accrual-based SAP from previous research, which has proven that SAP has been reflected in the presentation of government financial reports. However, in its implementation there are several other supporting factors in the implementation process so that SAP can be used more effectively in presenting government financial reports that are reliable, relevant, comparable and easy to understand, one of which is HR factors, technology factors, internal control factors and several factors. others.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden
Rohmadira Aditya
rohmadiraa6@gmail.com

Kata kunci:
Standar Akuntansi
Pemerintah, Berbasis AkruaI,
Penyajian Laporan
Keuangan

Website:
<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 174 - 194

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan berbagai referensi. Adapun manfaat penelitian ini dapat memperluas wawasan pembaca khususnya Masyarakat umum maupun SKPD mengenai apakah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dapat berpengaruh terhadap kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah serta apakah implementasi dari PP 71 Tahun 2010 telah tercermin kedalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini memberikan kesimpulan subjektif mengenai implementasi SAP berbasis akrual dari penelitian terdahulu, yang telah membuktikan bahwasanya SAP telah tercerminkan kedalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa faktor penunjang lain dalam proses pengimpletasiannya agar SAP dapat lebih efektif penggunaannya dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, salah satunya adalah faktor SDM, Faktor tekonologi, faktor pengendalian internal dan beberapa faktor lainnya..

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Indoonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem akuntansi didalam proses pelaporan keuangan-nya, pertumbuhan mengenai akuntansi sektor publik merupakan salah satu wujud dari keharusan akan pentingnya akuntanbilitas disetiap instansi didalam lingkup pemerintahan yang ada dalam Negara Indonesia. Maka dari itu, pada hakekatnya akuntanbilitas dalam konteks ini dapat diasumsikan menjadi sebuah kewajiban instansi pemerintah dalam melakukan pertanggungjawaban atas sebuah perolehan akan keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh satuan instansi pemerintah berdasarkan pada sebuah Visi maupun Misi yang telah disusun, hal ini dilakukan oleh pemerintah demi kesuksesan sebuah instansi terkait tujuan yang ingin digapainya (Juwita, 2013). Jika pemerintah dapat menciptakan sebuah kondisi *good governance* didalam instansinya dengan baik, maka pemerintah akan lebih mudah untuk menggapai akuntanbilitas dalam proses pelaporan keuangannya. Akuntansi sektor publik di

Indonesia pada dasarnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring berjalannya waktu. Hal ini dibuktikan karena disetiap kantor dinas, harus diwajibkan untuk melakukan *Good Government Governance (GUG)* (Novianti, I., 2018).

Organisasi sektor publik yang berada di Indonesia baik di tingkat pemerintahan pusat (Pempus) maupun di tingkat pemerintahan daerah (Pemda) dalam proses menyajikan sebuah hasil dari laporan yang berhubungan dengan kondisi keuangan instansi tersebut kepada pemerintah maupun publik secara terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, dan disajikan secara informatif serta dilaporkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor. 71 Tahun 2010 serta yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor. 64 Tahun 2013. Selepas tahun 1998, pada dasarnya pemerintah Indonesia mengalami perubahan signifikan mengenai sistem akuntansi yang digunakannya, dari yang mengadopsi sistem sentralisasi yang dimana seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban mengenai pelaporan keuangan-nya terpusat di tangan pemerintah pusat (Mawikere, L. M., 2022).

Dalam proses penyusunan serta pelaporan mengenai hal yang berhubungan dengan keuangan pemerintah, sangat diperlukan beberapa aspek penting yang menunjang akan keberhasilan serta kualitas dari laporan keuangan tersebut secara akuntabilitas dan transparan. Salah satu terobosan yang diambil oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berkolaborasi dengan pemerintah, dalam menyikapi hal ini adalah dengan menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah atau yang bisa disebut sebagai SAP merupakan pedoman atau aturan yang harus diimplementasikan oleh SKPD yang tersirat dalam standar akuntansi pemerintahan yang membahas mengenai komponen - komponen serta aspek - aspek yang ada pada standar akuntansi yang digunakan (Putri, A. N, 2023).

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mulai melakukan pengimplementasian mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengadopsi basis akrual kedalam proses penyusunan laporan kinerja keuangan pemerintahannya. Tak hanya di dalam lingkup pemerintahannya, pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengadopsi basis akrual juga di implementasikan secara signifikan oleh beberapa perusahaan sektor publik yang berada di wilayah Negara Indonesia, peristiwa ini pada dasarnya dibuktikan dengan adanya persetujuan serta peneraparan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 tahun 2010, yang Dimana peraturan tersebut berisikan bahwasanya mewajibkan organisasi sektor publik baik pusat maupun daerah supaya menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam menyajikan laporan keuangannya (Putra & Variana, 2021). Sebelum Indonesia menggunakan basis akrual kedalam penyajian laporan keuangannya, pada awalnya pemerintah Indonesia menggunakan basis kas (*Cash basic*). Basis kas (*cash basic*) menuju akrual merupakan salah satu basis akuntansi yang telah digunakan oleh instansi pemerintah Indonesia khususnya oleh SKPD yang digunakan dalam penyusunan serta pelaksanaan mengenai anggaran negara.

Indonesia tergolong sangat lamban dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (*accrual basic*), hal ini dikarenakan, pemerintah Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penerapan sistem akuntansi yang mengadopsi basis akrual (*accrual basic*) kedalam proses penyajian laporan keuangan pemerintahannya. Salah satu hal yang dibidang cukup lamban dalam penerapan-nya yaitu berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan pemerintah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proses pencatatan keuangan berbasis akrual (*accrual basic*) yang diterapkan diberbagai instansi pemerintah, termasuk yang terdapat dalam lingkup Pemerintah Pusat (Pempus) maupun yang terdapat pada lingkup Pemerintah Daerah (Pemda). Sebenarnya dalam menyikapi perkara ini, pada hakekatnya pemerintah telah mengatur didalam isi dari Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 (satu), Undang - Undang tersebut mengatur mengenai keuangan negara dan menetapkan bahwa penerapan dari pengukuran dan pengakuan mengenai pendapatan dan belanja secara akrual harus dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun dari diterbitkannya peraturan tersebut. Dalam mulainya peralihan dari basis kas menuju ke basis akrual, pemerintah kemudian mengeluarkan dan menetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), peraturan yang lebih spesifik membahas mengenai penerapan peralihan dari basis kas (*cash basic*) menuju akrual (*accrual basic*). Seiring berjalanya waktu, kemudian pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap peraturan lama yaitu PP Nomor 24 tahun 2005 dan kemudian mengeluarkan dan menerbitkan sekaligus menjalankan Undang - Undang baru pada bulan Oktober 2010, yakni PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akuntansi akrual. Hal ini pada dasarnya berguna untuk memastikan agar dapat terciptanya aturan yang lebih kuat bagi pihak penyelenggara kegiatan akuntansi keuangan sebuah Negara pada proses transisi dari sistem akuntansi menggunakan basis *Cash* menuju ke basis *Accrual*. Segala persoalan yang berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam peralihan sistem akuntansi akrual diharapkan mampu membawa Indonesia sejajar dengan Negara lain dalam waktu sekitar 4 (empat) Tahun. (NST, D. A. D, 2016).

Adanya pengimplementasian kebijakan untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual kedalam proses penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah mempunyai tantangan tersendiri dalam penerapannya, dikarenakan perlunya transisi mengenai penerapan yang awalnya mengadopsi PP Nomor. 34 Tahun 2005 pada akhirnya menggunakan PP Nomor. 71 Tahun 2010. Adapun faktor dari Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengamalan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam proses penyajian laporan keuangan. Pemahaman Sumber Daya Manusia mengenai SAP terkhusus pegawai yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan bidang akuntansi sebuah instansi, terkait konsep akuntansi berbasis akrual dapat mempengaruhi kualitas dalam menyusun ataupun melaporkan laporan keuangan pemerintah (Rumondang, T., S., S., 2021).

Kualitas laporan keuangan sebuah instansi merupakan sebuah gambaran dari kinerja dan bentuk tata Kelola dari instansi tersebut. Laporan yang memiliki sebuah kualitas didalamnya akan berdampak secara signifikan terhadap perolehan manfaat dimasa yang akan mendatang sebagai acuan dalam mengambil

sebuah keputusan pemerintah. Penelitian ini pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan masyarakat serta lembaga pemerintah mengenai pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam memastikan kualitas dari laporan keuangan. Dengan menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010, penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam hal yang berhubungan dengan apakah penggunaan SAP dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan di berbagai unit kerja pemerintah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada analisis spesifik di tingkat kota atau kabupaten atau beberapa kedinasan dalam lingkup pemerintah. Pendekatan penelitian ini lebih menekankan pada sintesis ulang dari penelitian sebelumnya untuk menyimpulkan temuan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Pendekatan metode kajian pustaka memungkinkan penelitian ini untuk menggunakan dan menggabungkan temuan artikel dari peneliti sebelumnya melalui berbagai sumber - sumber yang ada, sehingga diharapkan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bisa memberikan sebuah kontribusi dan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya SAP dalam konteks penyajian laporan keuangan pemerintah, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, kami menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan mengedepankan metodologi pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti yang berlandaskan dari filsafat kemudian diimplementasikan kedalam sebuah penelitian ilmiah dimana seorang peneliti tersebut berperan aktif sebagai instrument, serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis sebuah data yang bersifat kualitatif sangat menekankan pada interpretasi. Menurut Yulianai (2018), Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sederhana induktif. Induktif disini mempunyai arti bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang diawali dari adanya sebuah peristiwa atau proses penjelas dari mana suatu generalisasi yang pada akhirnya dapat dibuat sebuah kesimpulan mengenai suatu proses ataupun sebuah kejadian. Pendekatan kualitatif pada *systematic review* akan digunakan dalam meringkas hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang diimplementasikan didalam pencarian data sekunder di penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR). Menurut Triandini dalam Uswatun, H., 2023) *Systematic Literature Review* (SLR) merupakan sebuah metodologi penelitian tertentu berserta pengembangan yang berguna untuk menyatukan dan memperbaiki penelitian dengan fokus topik tertentu. Data yang kami gunakan adalah data skunder yang diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya melalui media *Google Scholar*, *Mendelay Reserch*, dan *Library Catalog*.

Secara umum, terdapat 5 langkah dalam proses persiapan pencarian bibliografi menurut (Cahyono, E. A., 2019):

- a. Mencari literatur sesuai topik yang diangkat menggunakan sumber yang dapat diakses untuk mendapatkan referensi penelitian.

- b. Melakukan evaluasi pada sumber yang didapatkan
- c. Meringkas sebuah kesalahan yang terjadi atau adanya ketidaksesuaian antara teori, konsep dan kondisi aktual.
- d. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan tinjauan literatur.

Garis besar ide metodologis yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dibawah ini, antara lain:

- a. Menggunakan media seperti Google Cendekia/*Google Scholar*, *Mendelay Research*, dan Web Google untuk mencari, mengumpulkan, dan memilah artikel ilmiah yang sesuai topik terkait dan berindeks Sinta.
- b. Temuan yang diperoleh dari penelusuran terdapat 28 artikel jurnal terkait, tetapi terdapat 12 artikel jurnal yang menjadi kunci peneliti melakukan penelitian ini.
- c. Setelah itu, berdasarkan pada temuan dan hasil dari artikel ilmiah tersebut, dibuatlah sebuah tabel analisis dan sebuah pembahasan.
- d. Setelah hasil temuan artikel ilmiah telah dianalisis, dari beberapa artikel tersebut timbulah sebuah kesimpulan dari fokus masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Temuan Artikel Jurnal Ilmiah

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
1.	Evaluasi Penerapan Basis Akrual Dalam Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolaga, (Studi kasus pada Pemerintah Kota Sibolga).	Jocelyn Sarah Gabriella Sinaga, Yusep Friya P. S, & Herbirowo Nugroho, <i>Account; Vol. 7 No. 2, 2020.</i>	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan serta pelaporan yang tertera didalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor 29 Tahun 2016. Neraca awal pada tahun 2017 telah tersusun dengan sistematis oleh satuan pegawai pemerintah Kota Sibolga dalam bentuk LKPD. Pemerintah Kota Sibolaga menerapkan SAP Berbasis akrual sejak pada tahun 2015 dalam penyajian LKPD Kota Sibolga. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan para pegawai pemerintah Kota Sibolga yang telah melakukan tugasnya dengan baik untuk mengimplementasikan

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
			dengan baik sistem akuntansi SAP berbasis akrual dalam proses pembuatan Laporan arus kas, dengan demikian, maka ketersediaan informasi mengenai sumber pengeluaran, saldo, dan perubahan saldo dari waktu ke waktu pelaporan dapat digunakan acuan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan. (Gabriella, S., J., S, 2020)
2.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng,	(Ida Bagus & Edy) JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Vol: 14 No.03 Tahun 2023)	Perubahan mengenai komponen yang berhubungan dengan laporan keuangan yang telah disajikan secara lebih rinci mengenai kegiatan operasional keuangan pemerintah, kelebihan ataupun kekurangan saldo anggaran Silpa/Sikpa, serta informasi yang berhubungan dengan aset dan penyusutan aset tetap dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengadopsi basis akrual, sehingga informasi yang diberikan telah memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan, antara relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan informasi yang disajikan mudah untuk dipahami sehingga mempermudah

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
			dalam pengambilan sebuah keputusan. (Ida Bagus & Edy, 2023)
3.	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.	Ni Putu Sri Mahayuni, Jurnal: Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia. 2023	Pelaksanaan Proses penyajian sebuah laporan keuangan, mewajibkan kepada pegawai RSUD untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akuntansi akrual secara lebih rinci dibandingkan dengan menggunakan basis kas. Selain itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sebuah RSUD daerah Wangaya tidak hanya mudah dipahami, relevan, dapat dibandingkan, dan juga andal, tetapi juga laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh direktur UOBK ataupun pengguna kepentingan lain dari laporan keuangan dapat mudah untuk mengambil sebuah keputusan demi kelancaran kegiatan operasi yang dilakukan oleh RSUD Daerah Wangaya (Mahyumi, 2023)
4.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian	Siti Hasanah & Tapi Rumondang Sari Siregar, Jurnal Akuntansi, Keuangan &	Menurut penelitian yang telah dilakukan, mengemukakan bahwasanya kualitas yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam hal menyajikan

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
	Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu.	Perpajakan Indonesia (JAKPI), 2021.	sebuah laporan keuangan, Sebagian besar sangat dipengaruhi oleh adanya pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terstruktur, penerapan SAP secara efektif, dapat memudahkan pemerintah dalam membuat dan menyampaikan hasil laporan keuangan guna menghasilkan laporan yang berkualitas dan terstruktur. (Rumondang, T., S., S., 2021)
5.	<i>Implementation of Accural Based Government Accounting Standards in the Regional Office of The National Land Agency (BPN) North Sumatra.</i>	Khoiril Yahya & Juliana Nasution, Jurnal: edukasi (Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi), 2022.	Dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor. 71 Tahun 2010, dalam prosedur penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah telah berpatokan dan sesuai dengan SAP dengan basis akrual. Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mengimplementasikan basis akrual, dalam proses menyusun dan menyajikan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Posisi Keuangan. Selain itu, dalam proses penyajian Laporan Realisasi anggaran juga menggunakan basis kas. Didalam penerapan SAP terdapat beberapa kendala yang dihadapi,

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
			salah satunya mengenai pengetahuan SDM tentang PP 71 Tahun 2010 yang masih harus diperhatikan (Nasution, J. Y. , 2022)
6.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.	Umar Sako dan Felmi D. Lantowa, JAS (<i>Journal of Accounting Science</i>), 2018.	Kualitas dari laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sejatinya sangat dipengaruhi secara positif oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerinath (SAP). Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan kualitas laporan keuangan hingga 80,4%, dan sisanya sebesar 19,6% dipengaruhi oleh beberapa faktor dan variable lain. Seperti yang telah disajikan didalam penelitiannya, yaitu faktor pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah, latar belakang Pendidikan pegawai, dan pelatihan mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan untuk melatih Sumber Daya Manusia dalam mengimplementasik standar Akuntansi Pemerintah (Umar, S., 2018)
7.	Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi	Yunita Kurnia Shanti, Jurnal Akuntansi	Dengan diterapkannya sistem informasi manajemen perencanaan

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
	Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Ciputat Timur).	Berkelanjutan Indonesia, 2018.	dan pelaporan atau bisa disebut dengan SIMRAL serta sistem akuntansi yang lebih terintegrasi dengan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pemrosesan mengenai belanja modal dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diakses langsung oleh pegawai pemerintahan yang bertanggungjawab dalam hal ini. Sistem akuntansi yang digunakan oleh SKPD Kecamatan Ciputat Timur ini semakin terintegrasi berkat penerapan SAP berbasis akrual, sehingga perhitungan mengenai belanja modal menjadi lebih sederhana. (Kurnia, 2018)
8.	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.	Septian Asriadi Putra & Rara Juniar Varina, Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau Vol. 1, No. 2, 2021.	Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal pelaporan keuangan pemerintahannya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, menggunakan versi terbaru sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan pelaksanaan, penyajian, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pasalnya, Pemerintah Kota Bengkulu menginginkan supaya laporan keuangan

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
			yang telah disusun bisa terealisasi dengan baik dan memiliki kualitas yang dapat dibandingkan. SAPD terbaru yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. (Putra, S., A., 2021).
9.	<i>The Effect of Understanding Government Accounting Standards on the Quality of Financial Statements.</i>	Fikri Ary Nugraha & Erry Andhaniwati, Jurnal: <i>COSTING (Journal of Economic, Business and Accounting)</i> , 2024.	Menurut peneliti bahwasanya setelah dilakukannya uji R-Square, kualitas laporan keuangan sejatinya 47,2% berasal dari pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan sebanyak 52,8% kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni Kompetensi Sumber daya manusia dan juga Teknologi Informasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan Lembaga yang bertugas untuk menilai Tingkat akuntabilitas serta membuat keputusan ekonomi, sosial, serta politik beracuan terhadap informasi keuangan yang disampaikan. Semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD, maka informasi yang

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
			dihasilkan akan mudah dipahami oleh pegguan (Nugraha, F., A., 2024)
10.	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir.	Jusmadi, Edduar Hendri, & Tomi Bayu Kurniawan, Jurnal Mediasi (Media Akuntansi), 2022.	Sekda Ogan Komering Ilir telah melakukan persiapan dan strategi secara matang demi terciptanya keberhasilan dalam pengimplementasian dari basis akrual dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Bagian Perekonmian & SDA Sekda Ogan Komering ilir untuk hal yang berhubungan dengan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrul, hal ini ditunjukkan agar memudahkan pemerintah ketika menjalakn tugas operasionalnya serta dalam hal melakukan analisis situasi keuangan dan bagaimana cara pemerintah dalam menentukan kemanjuran informasi yang disajikan. (Hendri, H., 2022)
11.	<i>The Effect of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence of Human Resources, And Use of Information</i>	Ratmi Dewi, <i>International Journal of Innovative Research and Advoenced Studies</i> (IJIRAS), 2020.	Didalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menyimpulkan bahwasanya peneliti tidak menemukan hasil korelasi yang positif antara penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
	<i>Technologi on Quality of Financial Statements.</i>		(SAP) berbasis akrual dengan kualitas dalam proses penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan wilayah yang dijadikan sampel uji pada penelitian sebelumnya. Peneliti juga menyimpulkan bahwasanya terdapat beberapa faktor - faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pemerintah, diantaranya adalah proses pengendalian internal, kualitas SDM, dan Teknologi Informasi (Dewi, 2020)
12.	<i>The Effect of Government Accounting Standards, Human resource Competence and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statement (Suroes of State Ministries in Indonesia).</i>	Qoirita Lehdiara & Nengzih, <i>International Journal of Scientific Research and Engineering Development</i> , 2020.	Didalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, memberikan pedapat bahwasanya terdapat pengaruh dari pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengadopsi basis akrual terhadap kualitas dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah. Hal ini dikarenakan bahwasanya SAP mengatur mengenai siklus akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan sebuah berabagai transaksi yang berkaitan dengan item - item yang telah ditemukan didalam laporan keuangan

No	Judul Artikel	Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit	Hasil
			pemerintah yang resmi, sehingga laporan yang dihasilkan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitatif sebuah laporan keuangan (Lehdiara, Q., 2020)

Sumber: *Temuan Data Peneliti 2024*

Berdasarkan hasil dari pencarian yang dilakukan, peneliti telah menemukan sebanyak 28 artikel dengan bantuan *Google Scholar* dan *Mendelay Research*. Setelah melakukan berbagai seleksi, terdapat 16 artikel yang menurut peneliti kurang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Sehingga didalam penelitian ini terdapat 12 artikel yang menjadi fokus penelitian utama yang akan diteliti, artikel tersebut sudah terdapat dalam tabel 1. Sehingga artikel yang akan peneliti review adalah sebanyak 12 artikel dari 28 artikel yang ditemukan.

Pembahasan

Penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Rumondang (2021) menyatakan bahwasanya kualitas dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sangat dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam proses penyajiannya. Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) diwajibkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman atau acuan yang digunakan oleh pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan instansi tersebut, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangannya secara andal, dapat dipertanggung jawabkan, dapat dibandingkan dan relevan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan pada umumnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara efisien, dapat mempermudah bagi pemerintah untuk menyiapkan dan menyusun laporan keuangan yang memiliki sebuah kualitas, efisien, dan mampu memberikan sebuah informasi yang akurat dan relevan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Jocelyn, et.al (2020) didalam artikel penelitiannya menyebutkan bahwasanya, pemerintah Kota Sibolga telah mewajibkan para pegawai pemerintah dalam penyusunan dan pelaporan LKPD menggunakan basis akrual, yang dimana basis tersebut digunakan dalam melaporkan, mencatat dan mengakui segala hal yang berhubungan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan - LO, dan beban yang digunakan pemerintah Kota Sibolga dalam kegiatan operasional sehari - hari. Setelah diberlakukannya SAP berbasis akrual, Kota Sibolga dalam Menyusun Laporan Finansial mengakui adanya Pendapatan dan beban - LO pada saat terjadinya hak untuk memiliki atau menagih pendapatan. Sedangkan beban - LO diakui ketika terdapat kewajiban yang disebabkan oleh manfaat ekonomi. Pemerintah Kota sibolga telah menggunakan SAP berbasis akrual dengan baik dan sesuai dengan prosedur, hal ini dibuktikan dengan

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan, bahkan saldo kas ataupun setara kas tersaji dengan baik didalam laporan arus kas pemerintah Kota Sibolga. Tidak hanya dalam lingkup pemerintahan saja yang dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi pemerintah, Rumah Sakit dibawah nanungan Pemerintah Daerah (Pemda) juga dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual kedalam proses penyajian dan pelaporan keuangannya.

Seperti yang telah diteliti oleh Ni Putu (2023) didalam penelitian yang dilakukan dilingkup RSUD Wangaya, memberikan pendapat bahwasanya pada saat awal pengimplementasian SAP berbasis akrual pegawai staf RSUD Wangaya mengalami sedikit kesulitan atas transisi dari basis kas menuju ke basis akrual. Tetapi informasi yang disajikan didalam laporan keuangan setelah menggunakan SAP berbasis akrual memberikan sebuah gambaran lebih komprehensif yang berhubungan mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan rumah sakit. Laporan yang dihasilkan dari basis akrual memberikan informasi leboh mudah untuk dipahami, relevan, dan andal. Selain itu, dapat memudahkan Direktur UOBK RSUD wangaya dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi dan memungkinkan bagi para pegawai untuk memprediksikan anggaran yang akan digunakan atau diterima diperiode mendatang.

Hasil serupa juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti hasnah, (2021), menunjukan hasilnya bahwasanya, SAP sangat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Labuhan Batu. Dengan demikian Tingkat kepatuhan pemakai SAP saat menyusun laporan keuangan dapat menentukan kualitas laporan yang akan dihasilkan. SAP juga mengatur bagaimana laporan keuangan semestinya harus disajikan, serta tanggungjawab mengenai pengelolaan keuangan pemerintah mengenai penyediaan laporan keuangan. Secara efektif, SAP dapat membantu pemerintah dalam Menyusun laporan keuangan karena telah memberikan pedoman guna menyusun laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Hasil serupa juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Umar Sako (2018), memberikan hasil analisis regresi yang telah dilakukan dari peneliti tentang bagaimana penerapan SAP dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam proses penyusunannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SAP yang efektif dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang telah disusun. Kualitas laporan keuangan akan meningkat ketika penerapan SAP dilakukan secara terstruktur sesuai dengan SOP.

Faktor yang mendukung penerapan SAP kedalam penyajian laporan keuangan pemerintah

Hasil dari penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang sangat sangat jelas bahwasan-nya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akrual sangat berdampak secara signifikan terhadap kualitas dalam proses penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, namun dalam proses pengimplementasiannya kedalam penyajian laporan keuangan, terdapat beberapa faktor pendukung demi keberhasilan penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah, sesuai yang terdapat dalam artikel yang telah disusun oleh (Ida Bagus & Edy, 2023)

menyebutkan bahwasanya, selain dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akrual demi mewujudkan kegiatan operasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, dan informasi yang disajikan mudah dimengerti tetapi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusi (SDM). Hal ini pada dasarnya disebabkan karena pemilihan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat menjamin akan keberhasilan penerapan SAP dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah, laporan yang dihasilkan dengan adanya SDM yang berkompeten diharapkan menjadikan sebuah laporan tersebut memiliki kualitas dan tidak mengandung materi, informasi, ataupun unsur lain yang dapat menyesatkan pembaca isi laporan tersebut. Penerapan adanya kompetensi SDM yang berkualitas dan sesuai dengan pedoman yang ada, akan memberikan efek peningkatan dari kualitas laporan keuangan yang telah disusun, dan dapat menimbulkan ciri - ciri karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan tersebut akan tercermin.

Faktor pembantu lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dan dapat menunjang keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Faktor Pengelolaan Teknologi Informasi juga berdampak secara signifikan terhadap pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akrual kedalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah supaya laporan yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan. Hal ini sejatinya telah diatur didalam PMK. No 270/PMK.05/2014 yang membahas mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat, lebih detailnya adalah terdapat pada pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) yang berbunyi Penerapan SAP dilaksanakan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khoirul Yahya & Juliana Nasution) menyebutkan bahwasanya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah mengkaji bahwasanya penerapan teknologi dan informasi dapat digunakan sebagai bagian upaya pemerintah dalam menerapkan SAP dilingkungan instansi terkait, hal ini dilakukan melalui aplikasi diantaranya adalah SAIBA, E - rekom, SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan dan banyak lagi (Nasution, J. Y. , 2022).

Aplikasi tersebut ialah wujud dari keseriusan pemerintah demi meperlancar proses pengimplementasian SAP berbasis akrual menggunakan teknologi yang semakin tahun semakin canggih dan dapat digunakan pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam proses penyajian laporan keuangan. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu kinerja Sumber Daya Manusia dalam proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan secara relevan, dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan datanya mudah dipahami. Maka dengan demikian penerapan SDM dan juga penerapan Teknologi informasi merupakan kesatuan yang harus dikembangkan oleh pemerintah supaya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah jauh lebih maksimal dan efisien. (Nasution, J. Y. , 2022).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratmi Dewi (2020) menjelaskan bahwasanya aspek mengenai pengendalian internal merupakan juga salah satu faktor yang dapat membantu pemerintah dalam keberhasilan menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintah yang pada akhirnya juga mempengaruhi seberapa baik penyajian laporan keuangan yang disajikan. Pengendalian internal sejatinya harus dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan anggota staf yang bertanggungjawab dibagian tertentu dari sebuah instansi yang telah didiseign untuk menciptakan sebuah kepercayaan yang relevan mengenai pencapaian yang berhubungan dengan keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal ini juga terdiri dari Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Resiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan komunikasi (*Information & Communication*), Pengawasan (*Monitoring*).

Penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki sejumlah keunggulan yang patut disoroti, termasuk ketepatan yang lebih baik dalam mencerminkan kondisi keuangan suatu lembaga dan kemampuan untuk memberikan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan hak dan wewenangnya. Tetapi, sebagian besar lembaga pemerintah, mulai dari tingkat daerah maupun pusat, masih menghadapi kendala dalam menerapkan sistem ini, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Kendala ini disebabkan oleh persiapan yang masih diperlukan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pegawai terkait dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam penerapannya juga perlu ditekankan lagi mengenai faktor – faktor pendukung akan kelancaran proses pengimplementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah yang memberikan output menjadi sebuah laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan informasi yang disajikan jelas keberadaannya sesuai dengan karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan.

Dapat kita simpulkan bahwasanya menurut beberapa peneliti sebelumnya, penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas dalam penyajian laporan keuangan, hal ini dikarenakan SAP yang terdapat dalam PP 71 Tahun 2010 merupakan sebuah pedoman yang digunakan oleh SKPD dalam menyusun dan melaporkan LKPD dalam sebuah entitas disatu tahun pelaporan. Dalam implementasinya beberapa peneliti terdahulu juga mengungkapkan mengenai berbagai faktor penunjang yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP tersebut.

SIMPULAN

PP Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akrual dalam proses penyajian laporan keuangan merupakan sebuah pedoman yang digunakan pemerintah dalam menyajikan dan melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana keuangan pemerintah kedalam bentuk laporan keuangan. Pada dasarnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akrual (*accrual basic*) sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas yang tersaji dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Demi terciptanya laporan keuangan yang mempunyai karakteristik kualitatif maka para

SKPD senantiasa harus mempertimbangkan beberapa faktor penunjang lainnya yang menyongsong keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basic*) dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan informasi yang disajikan mudah dipahami. Faktor tersebut meliputi Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan berbagai faktor lainnya. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual membawa dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun, keberhasilan penerapan ini juga ditentukan oleh faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan mengoptimalkan penerapan SAP serta mendukungnya dengan infrastruktur dan manajemen sumber daya manusia yang baik, diharapkan pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, E. A., H. S. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal keperawatan* , 12.
- Dewi, R. (2020, January). The Effect of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence of Human Resources, And Use of Information Teknologi on Quality of Financial Statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*. ISSN: 2394-4404, VII(1), 4 - 10.
- Gabriella, S., J., S, F. N. (2020). Evaluasi Penerapan Basis Akrual Dalam Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga, Studi kasus pada Pemerintah Kota Sibolga. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan perbankan Vol 7 No. 2*, 1346 - 1353.
- Hendri, H., K. J. (2022, Maret). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Mediasi (Media Akuntansi) ISSN 2685-6530, e-ISSN 2722-5577, Vol. 4 No. 2*, 199- 212.
- Ida Bagus, A. G., & Edy, S. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* , 824 - 838.
- Indonesia, R. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)*. 201.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201. doi:<https://doi.org/10.23969/trikononika.v12i2.480>
- Kurnia, Y. S. (2018, Januari). Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Ciputat Timur). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol. 1, No. 1*, 43 - 60.
- Lehdiara, Q., N. (2020, Nov - Dec). The Effect of Government Accounting Standards, Human resource Competence and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statement (Surves of State Ministries in Indonesia).

International Journal of Scientific Research and Engineering Development ISSN: 2581 - 7175, III(6), 863 - 878.

- Mahyumi, S. (2023, April). Analisis Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. *Hita Akuntansi dan Keuangan e-ISSN 2798-8961*, 206 - 2016.
- Mawikere, L. M., K. E. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Lppm Bidang*, 5(2), 1173 - 1182. doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/Index.Php/Lppmekososbudkum/Article/View/40270%0ahttps://Ejour>
- Nasution, J., M. (2022, April). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 3, No 1, 57 - 62.
- Nasution, J., Y. (2022, Juni). Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards in the Regional Office of The National Land Agency (BPN) North Sumatra. *Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi p-ISSN: 2355-3573, e-ISSN: 2580-8818*, Vol. 10, no. 1, 15 - 22.
- Novianti, I., S. S. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01), 115 - 130. doi:<https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256>
- NST, D. A. D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis AkruaI dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*, 18(4), 1 - 122.
- Nugraha, F., A., A. (2024). The Effect of Understanding Government Accounting Standards on the Quality of Financial Statements. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting e-ISSN : 2597-5234, Volume 7 Nomor 3, Tahun 2024*, 3921 - 3926.
- Putra, S., A., V. (2021, Juli - Desember). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941* , Vol.1, No. 2, 85 - 98. Retrieved from <http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm>
- Putri, A. N, U. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 279 - 288.
- Risma, W., R. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, Vol. 3 No.1, 23 - 34.
- Rumondang, T., S., S., H. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, Vol: 9 No:1, 39 - 47.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Umar, S., L. (2018, Januari). Pengaruh Peneraparan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JAS (Journal of Accounting Science)*, Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501, 43 - 54. doi:<https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1101>
- Uswatun, H., D. M. (2023, November). Pemanfaatan Big Data dalam Digital Marketing. *Prosenam*.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Prespektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Quanta STKIP Siliwangi*, 2(2).